



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 758/II/2013

II/FEBRUARI 2013



PEMILU
DPR, DPD, dan DPRD
INGAT!
APRIL
2014



Kemendagri dan KPU Diminta Sinkronkan Data Penduduk

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Minggu kedua bulan Februari ini dibuka dengan Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Februari yang mengagendakan: [1] pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Komisi IX DPR tentang Keperawatan menjadi RUU DPR dan [2] pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Minggu ini juga dilaporkan berbagai kegiatan Komisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dan konsultasi pimpinan dengan fraksi dan Komisi I mengenai pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Kegiatan Bidang Legislasi

Rapat Paripurna tanggal 12 Februari, telah mengagendakan dua acara berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Komisi IX DPR tentang Keperawatan menjadi RUU DPR.

[1] Mengawali pembicaraan tingkat II, Ketua Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Drs. Adang Darajatun, melaporkan hasil pembahasan RUU yang merupakan usul Pemerintah. Pembahasan RUU ini telah dimulai 12 Juni 2012. RUU ini pada pokoknya menguraikan tentang telah diratifikasinya oleh Indonesia tentang Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 (*International Konvention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999*), dan RUU ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 6 tahun 2006 tentang Pengesa-



han atas Konvensi ini. Pentingnya penyusunan RUU ini adalah sebagai komitmen Indonesia dalam memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana. Ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang ada saat ini belum mengatur secara memadai dan komprehensif. Dengan RUU ini, dapat digunakan sebagai instrumen HAM dan politik yang perlu dikedepankan hal-hal yang sensitif, sehingga dapat melindungi setiap warga negara Indonesia secara efektif tanpa mendapat intervensi dari dunia internasional.

Penjelasan umum dari RUU ini adalah: [1] tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, serta merupakan pelanggaran berat terhadap HAM terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah NKRI telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik



dan hubungan internasional. [2] upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana, karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. RUU ini juga sejalan dengan tujuan nasional NKRI sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI tahun 1945. [3] komitmen masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme diwujudkan dengan disahkannya konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme 1999 dan telah diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan pendanaan terorisme 1999. Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka Indonesia telah memiliki instrumen hukum penting dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme dan menjadi penguatan terhadap pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme.

[2] RUU Keperawatan telah diusulkan oleh Komisi IX DPR-RI, dan telah melalui pemrosesan oleh badan legislatif DPR dalam bentuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tentang Keperawatan. Dengan demikian, RUU ini telah sesuai dengan pasal 60 huruf d peraturan tata tertib DPR-RI dan pasal 30 ayat 1 peraturan DPR RI no. 2 tahun 2012 tentang tata cara mempersiapkan RUU. Dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Februari, kesembilan fraksi telah memberikan persetujuan atas RUU Keperawatan, inisiatif komisi IX, menjadi RUU DPR-RI. Atas dasar persetujuan tersebut, maka DPR-RI akan melakukan tindak lanjut terhadap pembahasan RUU tentang Keperawatan ini, yang penanganannya akan disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur tata tertib DPR-RI.

Pentingnya RUU Keperawatan ini, agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan untuk meningkatkan, mengarahkan serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan praktek Keperawatan yang bertanggungjawab, akuntabel, bermutu dan aman, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan RUU ini, juga diharapkan dapat dilakukan pembenahan internal terhadap pendidikan Keperawatan, pelayanan Keperawatan, asuhan Keperawatan dan praktek Keperawatan. Disamping itu, juga dilakukan pembenahan eksternal yang mengacu pada tantangan untuk dapat memenuhi tuntutan adanya kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan lisensi bagi perawat.

[3] Berkaitan dengan fungsi legislasi, beberapa RUU

dari DPD yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI, oleh rapat Bamus tanggal 7 Februari, telah diputuskan ditindaklanjuti oleh badan legislasi sesuai dengan peraturan tata tertib DPR-RI.

Kegiatan Bidang Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran, Komisi I DPR-RI telah melakukan Raker dengan Panglima TNI, dengan agenda pembahasan dana optimalisasi Kemhan TNI TA 2012 sebesar Rp. 678 M. Kesimpulan dalam Raker tersebut adalah, Komisi I memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran TNI TA 2012 sebesar 98,75%, serta peningkatan capaian kinerja TNI dibandingkan kinerja tahun 2011. Berkaitan dengan itu, Komisi I meminta TNI untuk terus meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berkaitan dengan hasil temuan BPK-RI terhadap laporan TNI TA 2011, Komisi I DPR-RI minta TNI untuk memperhatikan rekomendasi dan catatan BPK dan menjadikannya sebagai panduan untuk pelaksanaan tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan sistem pengadaan Alutsista TNI, ada beberapa hal yang mendapat perhatian Komisi I yang perlu menjadi catatan yaitu: [1] tetap konsisten dengan rencana pengadaan alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan alutsista. [2] memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam setiap pengadaan alutsista agar alutsista dimaksud memiliki daya pengantar (*different effect*) yang maksimal.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Telah dilakukan rapat Tim Pengawas Century dengan Kapolri dan Jaksa Agung pada 6 Februari dengan kesimpulan antara lain: [1] Timwas Century memberikan apresiasi terhadap *progress report* yang disampaikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung. Timwas juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus aliran dana yang dilaporkan dalam hasil audit BPK, serta mendorong untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, [2] aparat penegak hukum diharapkan fokus pada upaya pengembalian aset Bank Century dan dana nasabah Antaboga Delta Sekuritas yang digelapkan, dan meningkatkan upaya untuk mengungkap kasus tersebut sehingga dapat dialokasikan untuk mengganti dana nasabah Antaboga Delta Sekuritas. Untuk tindak lanjutnya, Timwas akan mengundang Tim Aset Recovery Bank Century.

RDP Komisi III dengan KPK pada 6 Februari 2013 menyimpulkan: [1] Komisi III DPR-RI mendesak KPK untuk melakukan percepatan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan prioritas kasus

yang berkaitan dengan kepentingan nasional (*national interest*) dan korupsi berskala besar (*grand corruption*), khususnya di sektor Migas, pertambangan umum dan keuangan/perpajakan, [2] DPR mendesak KPK mengefektifkan fungsi pencegahan dengan mengumumkan hasil pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi korupsi di semua lembaga negara dan pemerintah, serta melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi KPK dalam meningkatkan indeks integritas nasional di kementerian/lembaga., [3] Komisi III mendesak kembali KPK untuk meningkatkan program pemberdayaan aparatur penegak hukum lain, agar efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari *road map* KPK. Komisi III mendesak KPK mempercepat penuntasan penanganan kasus dengan tidak terbang pilih atas dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal, pada tingkat penyelidikan tidak ditemukan bukti permukaan yang cukup, untuk segera dihentikan penyelidikan demi tercapainya kepastian hukum.

Dalam fungsi pengawasan, Komisi VII telah melakukan Raker dengan Menteri ESDM dan RDP dengan Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT PGN (Persero Tbk), serta RDPU dengan Dahlan Iskan dan Fahmi Mohtar. Acara ini berlangsung tanggal 6 Februari. Namun, karena pada Raker tersebut Menteri ESDM serta Dahlan Iskan selaku mantan Dirut PT. PLN tidak hadir, maka rapat diubah menjadi RDPU. Kesimpulan rapat ini antara lain, Komisi VII mendesak PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan hasil operasi penertiban arus listrik (Opal), khususnya terkait dengan data kendala gardu PLN dan surat kurang bayar dari gedung Ghara Pena dan pelanggan listrik lainnya, di lingkungan gardu PLN, [2] Komisi VII mendesak PT. PLN (Persero) mengatasi kendala pasokan energi pembangkit tenaga uap dan keekonomian ketenagalistrikan di Kaltim.

RDPU Komisi IX dengan Ketua Palang Merah Indonesia tanggal 6 Februari, mengagendakan penjelasan PMI mengenai prosedur penanganan donor darah dan upaya PMI meminimalisir terjadinya kesalahan transfusi darah, dan peran PMI dalam penanganan masalah kesehatan pada keadaan bencana dan peran ICRC sebagai lembaga internasional. Kesimpulan rapat antara lain, Komisi IX menyampaikan apresiasi kepada PMI yang telah melakukan terosbosan-terobosan nyata guna memenuhi kebutuhan darah di Indonesia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pemenuhan SDM transfusi darah sebagai amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah. Komisi IX mendorong PMI untuk menyusun *road-map* pelayanan darah sepuluh tahun kedepan, yang mencakup pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk harga yang akan menjadi rujukan. Komisi IX DPR mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan subsidi pengadaan darah secara bertahap, sehingga darah bisa bebas biaya guna memenuhi amanat Pasal 90 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lain-Lain

Hasil konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan Komisi I tentang permohonan pertimbangan dari Presiden RI kepada DPR tentang penetapan duta besar LBBP Republik Demokratik Federal Ethiopia untuk Republik Indonesia dan pertimbangan bagi pencalonan duta besar LBBP Republik Portugal untuk Republik Indonesia. Konsultasi memberikan persetujuan terhadap calon-calon duta besar yang bersangkutan.**

Kemendagri dan KPU Diminta Sinkronkan Data Penduduk

Komisi II DPR meminta Kemendagri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perbaikan terstruktur atas data penduduk, Integralisasi sistem kependudukan antara Pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk menghindari deviasi angka dan kemungkinan terjadinya data penduduk yang tidak valid.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Ganjar Pra-

nowo dengan Dirjen Dukcapil Irman di Jakarta, Senin (11/2). Kesimpulan ini mengemuka atas kekecewaan Komisi II adanya ketidaksinkronan data KPU Jabar, Jatim, Jateng, dan Bangkalan. Dalam acara ini ditemukan adanya selisih data kependudukan yang cukup tinggi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ganjar kejadian sangat ironis, karena selisih data kependudukan tersebut hampir terjadi di



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

seluruh provinsi di Pulau Jawa. Data di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saja misalnya, berdasarkan data yang disodorkan Pemprov Jateng jumlah penduduk Jateng sebanyak 39,29 juta jiwa. Jumlah tersebut berbeda dari data yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil yaitu 32,57 juta jiwa.

Sementara KPU sendiri dalam mendata daftar calon pemilih dalam Pemilu 2014 mendatang lebih menggunakan data yang telah diberikan oleh pemerintah daerah atau provinsi, dan bukan mengikuti data yang terangkum dalam Dirjen Dukcapil. “Jika hal ini dibiarkan sampai pemilu mendatang menurut anggota komisi II DPR RI dari FPDIP Rahadi Zakaria akan menimbulkan konflik ke depan,” tegasnya.

Ditegaskannya, perbedaan ini akan menimbulkan konflik saat pilkada dan pemilu legislative mendatang, baik berkaitan dengan jatah kursi di parlemen. Terutama konflik akan muncul pada pihak yang kalah dalam pemilihan tersebut.

Bahkan, ungkap Akhmad Muqowam, anggota Komisi II dari FPP, pihaknya meminta sebelum ada data yang pasti, maka dirinya meminta pemerintah untuk tidak menyelenggarakan Pilkada terlebih dahulu. Sementara itu menurut Yandri Susanto, anggota Komisi II dari FPAN mengungkapkan bahwa sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Pemilu, dimana Kemendagri diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu.

“Jika ada selisih data, maka

sesuai amanah UU no. 23 tahun 2006 maka kita harus meyakini bahwa data yang benar adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, apalagi sekarang sudah ada E-KTP yang bisa meminimalisir data yang ganda,” pungkaskan Yandri.



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Untuk menghindari saling lempar kesalahan dalam penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu 2014 yang berkaitan dengan data penduduk tersebut, maka dalam rapat tersebut disetujui bahwa sesuai amanah Undang-undang maka KPU harus menggunakan data yang diberikan atau dikeluarkan oleh Kemendagri Pusat.

Meski demikian Pimpinan Sidang Ganjar Pranowo menegaskan, Kemendagri dan KPU harus kembali turun ke lapangan untuk membersihkan data-data jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang menjadi calon pemilih, sebagai suatu data yang akan digunakan dalam Pilpres dan Pemilu legislative (pileg) 2014 mendatang. (ayu,nt)foto:wy/parle.



Rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu.

PT PAL Perlu Dukungan Politik

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI Yahya Sacawiria menilai upaya PT PAL untuk bangkit menjadi industri strategis unggulan tidak berjalan lancar. Perusahaan industri galangan kapal ini terjerat hutang yang menurutnya karena kesalahan manajemen sebelumnya.

“Hutang warisan ini adalah kesalahan manajemen yang lalu, tapi tentu perusahaan tidak bisa lepas tan-



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso didampingi Anggota BAKN Teguh Juwarno meninjau PT PAL Surabaya.

gan. Tahun lalu kita catat kinerja direksi baru cukup berhasil, DPR juga memberi dukungan dengan menye-

ujui anggaran 2 triliun untuk 3 industri strategis termasuk PT PAL,” kata Yahya saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL di Surabaya, Jatim, Kamis (14/2).

Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mempertanyakan ketegasan perusahaan dalam memberikan sanksi kepada karyawan yang telah melakukan penyimpangan. “Bagaimana perusahaan menjalankan rekomendasi dari BPK agar menjatuhkan sanksi kepada karyawan telah merugikan,” tekannya.

Ia menambahkan segenap pihak perlu memberi perhatian kepada industri strategis yang bisa menjadi taruhan reputasi bangsa ke depan. DPR perlu memberikan dukungan politik memaksa institusi seperti TNI, Polri agar menggunakan produk PT PAL. “Kejayaan PT PAL ini bisa membuat anak bangsa berdiri tegak dalam pergaulan internasional.”

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua BAKN Sumarjati Arjoso tersebut ditetapkan 4 kesimpulan diantaranya meminta PT PAL segera menuntaskan rekomendasi BPK dengan pendampingan dari BPKP untuk membangun sistem pengendalian internal.

Memberi sanksi kepada pegawai PT PAL yang telah melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. BAKN juga meminta dalam melakukan kontrak dimasa datang harus menggunakan *legal cooperate* berkualitas internasional. (iky), foto: iky/parle.

Timwas DPR Usulkan Bila Penjualan Aset Tak Cukup, Penggantian Dana Nasabah Lewat APBN

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR meminta skema penggantian dana nasabah Bank Century yang terkait kasus PT Antaboga Delta Sekuritas berasal dari dana tunai dan aset-aset yang disita berdasarkan laporan Kapolri dan Jaksa Agung, harus segera dilakukan penjualan.

Demikian kesimpulan rapat Tim Pengawas (Timwas) Century DPR dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie dengan Sekjen Kementerian Keuangan Ki Agus Ahmad Badarudin, Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS), Direksi Bank Mutiara dan Wakil nasabah eks Bank Century, di gedung DPR Jakarta, Rabu (13/2)

Kesimpulan rapat juga menyebutkan, apabila penyelesaian dana



Ketua DPR Marzuki Alie memimpin rapat Timwas Century.

nasabah berdasarkan skema diatas tidak mencukupi, Timwas Century DPR mengusulkan untuk di-



selesaikan melalui APBN.

Dalam rapat yang membahas skema pembayaran nasabah Bank Century, sejumlah anggota mengusulkan, karena sudah berlarut-larut cukup lama selama tiga tahun pembayaran dana nasabah belum ada penyelesaian, maka saatnya ditangani pemerintah melalui APBN.

Anggota FPD Achsanul Qosasi menyatakan sejak awal tetap konsisten agar penyelesaian nasabah Bank Century melalui APBN. “Solusi yang paling tepat adalah melalui APBN. Tidak mungkin Bank Mutiara akan membayar dan juga tidak mungkin LPS yang menyelesaikan,” katanya.

Ia menyebutkan beberapa aset Robert Tantular yang telah disita dan dikuasai negara, maka gilirannya pemerintah menyelesaikan melalui APBN. Sejak awal kata Qosasi, tidak sepakat jika Bank Mutiara yang menyelesaikan, sebab sesuatu yang tidak noted di buku, itu berbahaya apalagi bank ini sudah go public.

Meski katanya sudah inkrah segala macam, tidak mungkin Bank Mutiara berani, karenanya harus mel-



Anggota Timwas Century Sidarto Danusubroto.

lui APBN. “Saya khawatir kasus ini tidak segera diselesaikan, tidak akan akan menguntungkan pemerintah dan dimanfaatkan berbagai pihak seolah-olah menguntungkan parpol tertentu,” tegasnya.

Kalau usulan tersebut diterima, ia optimis tahun 2014 mendatang masalah ini akan selesai. Meski demikian ia menyatakan bukan tidak ada lawan, negara menguasai aset Robert Tantular di Hongkong sebesar 1,6 juta US\$, dan ada aset di Swis. “Ini harus negara yang menyelesaikan, kalau Kemenku dan LPS wajar tidak berani tapi DPR bisa memutuskan dan dibawa ke Sidang Paripurna,” ujarnya dengan me-

nambahkan bahwa uang nasabah eks Bank Century sebesar 1,4 T itu sama dengan 0,01% 1.600 T APBN kita.

Hal yang sama dikatakan anggota FPKB, FPAN dan FPD Perjuangan Sidarto Danusubroto yang meminta negara untuk turun tangan menangani nasib nasabah Bank Century yang terkatung-katung selama tiga tahun. Namun Sidarto penyelesaian dana nasabah Bank Century melalui APBN sebagai langkah terakhir setelah penjualan aset dan uang tunai yang disita. “Perlu langkah-langkah emergency tetapi harus tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujar Qosasi menambahkan. (mp), foto : iw/parle/hr.



Anggota Timwas Century Achsanul Qosasi.

DPR Akan Panggil Meneg BUMN Terkait Nasib eks Karyawan Asosiasi BUMN

Komisi VI DPR akan segera memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan guna meminta pertanggungjawabannya terkait persoalan internal nasib eks karyawan PT. Antam, Perum Pengangkutan Jakarta (PPD), Persatuan Pensiunan Karyawan Perkebunan Republik Indonesia (P2KPRI).



Rapat Komisi VI DPR dengan jajaran PT. Antam, PPD, dan Persatuan Pensiunan Karyawan Perkebunan Republik Indonesia (P2KPRI).

“Kita akan segera memanggil Kementerian BUMN untuk meminta tanggung jawabnya terhadap nasib karyawan di Perusahaan BUMN tersebut,” Kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana kepada Parlementaria, Selasa sore, (12/2).

Menurut Erik, hak para karyawan harus segera dipenuhi oleh BUMN tersebut, karena memang hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan meski pun perusahaan itu akan kolaps. “Negara memiliki kewajiban mematuhi hak karyawan sepanjang ada aturannya,”ujarnya.

Erik mensinyalir adanya pembiaran oleh jajaran Direksi terkait persoalan nasib eks karyawan di Merpati. “Saya khawatir adanya modus operandi yang sama melakukan pembiaran terhadap beberapa nasib BUMN, kenapa kinerja Lion Air lebih baik dibandingkan Merpati,” paparnya.

Dia mengatakan, Direksi BUMN gagal memenuhi hak dan janjinya terhadap nasib eks karyawan akan kita evaluasi. “Bahkan kalau tidak cakap kenapa harus dipertahankan,” katanya. (si), foto : iw/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana.

Eva K. Sundari: Belum Ada Polisi Wanita Yang Bicara Kejahatan Seksual



Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari.

Kejahatan seksual terhadap wanita dan anak-anak terus berkembang dengan volume kasus yang meningkat. Sensitifitas gender dibutuhkan dalam menangani kejahatan maupun kekerasan terhadap wanita. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), saat rapat kerja dengan Kapolri, Rabu (13/2).

Menurut Eva, para polisi wanita perlu dikerahkan menangani penyidikan atas kasus kejahatan seksual atau kekerasan gender dan anak. Selama ini, katanya, polisi wanita tidak pernah bicara soal kejahatan seksual. Dengan ditangani polisi wanita, kasus-kasus seperti ini bisa ditangani secara serius, karena ada sensitifitas gender tadi.

“Terhadap kejahatan seksual gender dan anak, tidak pernah ada polisi wanita yang bicara,” tandas-

nya. Seperti diketahui, kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap wanita, justru banyak ditangani oleh penyidik polisi pria. Untuk itu, perlu ada pembenahan tersendiri dalam persoalan ini.

Pada bagian lain, Eva juga menyampaikan bahwa ternyata kasus-kasus malapraktek yang masuk ke kepolisian, sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Eva mengungkapkan, data dari LBH Kesehatan, ada ratusan kasus malapraktek, tapi hanya satu, dua yang ditindaklanjuti hingga ke pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Ini mengindikasikan bahwa jajaran penyidik di kepolisian tidak memahami betul hukum dan UU kesehatan. Padahal, ada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lembaga resmi yang bisa dimintai pendapat sebelum menindaklanjuti kasus malapraktek.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika (F-PD), dan didampingi Wakil Ketua Al Muzammil Yusuf (F-PKS) serta Tjatur Sapto Edy (F-PAN), ini dimulai pada pukul 10.15 WIB. Kapolri, Wakapolri, dan semua jajaran dari Mabes Polri hadir dalam rapat terse-

but. Berbagai kritik tajam mengemuka dalam rapat tersebut.

Kritik lain yang disampaikan Eva Kusuma Sundari adalah soal pembenahan metode pendidikan kepolisian. Ia mengungkapkan contoh kasus aktual yang dibawanya di hadapan rapat Komisi III adalah keprihatinan seorang istri polisi yang melihat suaminya berubah sikap dan karakteristik seperti seorang yang tidak mengenal dirinya lagi. Bila diajak bicara oleh istrinya, sang suami yang polisi itu tak responsif lagi.

Ini berarti ada yang salah dengan metode pendidikan di kepolisian kita. “Seperti ada cuci otak,” katanya. Kekerasan fisik yang berlebihan terhadap siswa-siswa kepolisian selama pendidikan harus dikurangi bahkan ditiadakan. (mh), foto :wy/parle/hr.



Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari berjabat tangan dengan Kapolri Timur Pradopo.

DPR Harap RUU Pertanahan Bisa Selesai Di Masa Sidang 2013

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) diharapkan bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR di masa persidangan tahun 2013. Diharapkan, di tahun 2014, UU Pertanahan sudah bisa diimplementasikan. Sebab, DPR beranggapan kehadiran UU Pertanahan nantinya bisa menjadi solusi bagi berbagai masalah pertanahan di Indonesia.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan sejumlah pakar agraria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/2). Adapun pakar agraria yang diundang dalam RDPU Komisi II DPR antara lain, Prof Maria SW Sumardjono (UGM),



Komisi II DPR himpunan masukan pakar-pakar agraria.

Prof Arie Sukanti Hutagalung (UI), Prof Dr Nurhasan Ismail (UGM) dan Dr Kurnia Warman (Universitas Andalas).

Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Abdul Hakam Naja, RUU tentang pertanahan ini merupakan RUU inisiatif DPR yang sudah dirumuskan sejak tahun 2012. "RUU ini bila sudah menjadi undang-undang bertujuan untuk menggantikan sekaligus memperbaiki UU Pokok Agraria No 50 tahun 1960 yang sudah tidak relevan lagi untuk mengatasi masalah pertanahan di zaman sekarang," kata Hakam Naja.

Hakam Naja mengatakan, RUU Pertanahan merupakan sebuah peraturan teknis. Namun, tidak banyak kepentingan politik di situ. "Maka, pembahasan RUU Pertanahan tersebut juga bisa lebih cepat dibandingkan yang lain," ujarnya.

Menurut dia, dalam RUU Pertanahan akan dibahas dan diatur cara penanganan terhadap sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat, badan usaha, instansi pemerintahan, dan negara.

"Dengan maraknya konflik dan persengketaan tanah di beberapa daerah, baik antara masyarakat dengan perkebunan, pertambangan, atau lembaga tertentu maka diperlukan undang-undang pertanahan sebagai solusi untuk hal-hal seperti itu," katanya.

Selanjutnya, dia mengatakan UU Pertanahan itu nantinya dapat menjadi penghubung antara undang-undang sektoral yang terkait dengan pertanahan, seperti undang-undang tentang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan tanah untuk pembangunan jalan.

"Dalam hal ini UU Pertanahan berfungsi menjembatani antara undang-undang sektoral yang satu dengan yang lain, tentunya yang berhubungan dengan soal pertanahan," katanya.

Sementara itu guru besar hukum agraria dari UI Prof Arie Sukanti Hutagalung mengatakan, sejumlah hal perlu dicermati oleh Komisi II DPR dalam kelanjutan Naskah Akademik RUU Pertanahan tersebut. Antara lain, sifat keperdataan dari hak-hak atas tanah, perlu diatur lebih lanjut.



Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.

Kasus yang sering terjadi, kata Arie, adalah lepasnya hak pemilikan seseorang karena hambatan birokrasi dalam pengurusan tanah. Misalnya, pengurusan perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlaku habis. Seseorang sudah mengikuti aturan itu. Tapi, ternyata, perpanjangan tersebut baru diterbitkan delapan tahun setelah itu.

"Sebelum perpanjangan tersebut diberikan, bisa saja tanah tersebut lalu diambil oleh negara karena HGB-nya dianggap tidak diperpanjang. Seperti yang terjadi dalam kasus Hambalang. Kalau seperti itu yang terjadi, siapa sebenarnya yang bersalah?" kata Arie.

"Jadi, ketentuan tentang hak milik tanah, sebaiknya diatur lebih jelas dan rinci dalam Naskah Akademik RUU Pertanahan," lanjutnya.

Seperti diketahui, salah satu tujuan RUU ini bertujuan untuk menggantikan sekaligus memperbaiki UU Pokok Agraria (PA) No 50 tahun 1960 yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Menurut guru besar hukum agraria dari UGM Prof Maria SW Sumardjono, pada saat penerbitan UU PA pada masa itu masalah berkenaan dengan sumber daya agraria selain tanah belum merupakan hal yang strategis. “Di samping itu masalah berkenaan dengan

penanaman modal dan konflik penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria belum diantisipasi,” katanya. (nt), foto : wy/parle/hr.

Priyo: Negara Tidak Boleh Lagi Kecolongan Aksi Teror



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan naskah akhir RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI menyatakan dapat menerima RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam melindungi keamanan warga negara dari tindak pidana terorisme.

“Hari ini negeri kita yang tercinta sudah mempunyai payung hukum yang cukup kokoh, yang dapat melindungi keamanan warga negara dari tindak pidana terorisme. Saya titip kepada Pak Amir, Menkumham

dan Presiden, negara tidak boleh kecolongan lagi aksi terorisme dengan alasan apapun,” kata Pimpinan Sidang Paripurna Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/13).

RUU yang diselesaikan dalam 3 kali masa persidangan ini melibatkan 3 menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Penyelesaiannya diharapkan dapat membantu komitmen Indonesia bersama masyarakat internasional memerangi dan memberantas tindak pidana terorisme, namun tetap sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap HAM dan kepentingan nasional.

“UU ini penting dan menjadi salah satu maha karya keperiodean DPR kali ini, karena pertimbangan tidak sekedar internasional tapi juga kepentingan nasional dan penghormatan terhadap HAM,” lanjut Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini.

Sementara itu dalam sambutan mewakili Presiden, Menkumham Amir Syamsudin mengatakan kehadiran undang-undang ini mengubah paradigma penanggulangan terorisme. “Kita memerlukan modernisasi pendekatan penanggulangan terorisme dari yang selama ini hanya berorientasi pada pelaku - *follow the suspect* menjadi berorientasi penelusuran aliran dana - *follow the money* agar kejahatan tersebut dapat segera terlacak dan ditanggulangi,” demikian Amir. (iky)foto:iwan armanias/parle.

DPR Minta BPH Migas Sosialisasikan Penggunaan BBG

Komisi VII DPR meminta BPH Migas melakukan sosialisasi penggunaan BBG yang aman dan ramah lingkungan.

Pendapat itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, di Gedung DPR RI, Selasa, (12/2).

Anggota DPR Mulyadi dari Partai Gerindra mengata-

kan, perlu segera didorong proses konversi Bahan Bakar Migas karena memang produk BBG itu aman dan ramah lingkungan. Selain itu, BPH Migas harus menyusun dan menginventarisasi program yang ada guna mengembangkan *road map* BPH Migas kedepannya

Dia menambahkan, BPH Migas harus melakukan proses investigasi terkait BBM subsidi, sehingga dapat diketahui modulusnya siapa saja yang bermain BBM tersebut.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali memimpin RDP dengan BPH Migas.

Asfihani (F-PD) menilai, tugas BPH Migas itu sangat berat karena harus mengawasi uang BBM Bersubsidi sebesar Rp.17 Triliun. “Selama tahun 2012 ini

BBM ini mengalami kegagalan,” ujarnya. (si), foto: iwan armanias/parle.

saja yang bisa diselamatkan uang negara hanya 0.13 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati bahwa volume BBM itu sebesar 46 juta KL artinya DPR meminta jangan sampai volume tersebut jebol. “Jika terjadi maka pengawasan kita anggap gagal, ini sangat disayangkan, kita tanya BPH Migas bisa tidak mengendalikan ini jangan sampai volume

DPR Minta Kurikulum 2013 Ditunda Penerapannya

Komisi X DPR RI meminta Kurikulum 2013 ditunda penerapannya, pasalnya banyak daerah belum siap. Hal tersebut, disampaikan Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar disela-sela Kunjungan Spesifik Komisi X tentang Kurikulum 2013 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/2).



Dedi Suwandi Gumelar (F-PDI Perjuangan)

Di Sumsel saja, menurut Dedi, sosialisasi tentang Kurikulum 2013 sangat minim bahkan belum dilaksanakan sehingga banyak guru yang belum memahami hal ini.

Disamping guru, murid-murid pun belum memahaminya. Materi Kurikulum 2013, dikhawatirkan tidak bisa diserap siswa siswi yang ada di daerah-daerah di Indonesia

termasuk Sumsel. “Saya khawatir Materi Kurikulum 2013 tidak bisa diserap siswa dan siswi yang ada di daerah-daerah di Indonesia termasuk Sumsel,” kata politisi F-PDIP.

Selain itu, kata Dedi, tahun ajaran baru dimulai Juli 2013, sehingga dengan waktu cukup singkat kemungkinan pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal.

“Hal lebih penting lagi, selain sosialisasi adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama guru agar proses belajar mengajar menjadi lebih bagus,” imbuhnya.

“Jangan hanya menyalahkan tenaga pengajar, fasilitas termasuk pembinaan yang diberikan selama ini perlu dievaluasi sudah maksimal atau belum,” tambah Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Banten.

la menambahkan, sebaiknya penerapan Kurikulum 2013 dilakukan apabila semuanya sudah siap, termasuk fasilitas penunjang belajar.

Dijelaskan Dedi, bahwa DPR hanya sebatas menyarankan, yang lebih utama adalah pemerintah sebagai pelaksana kegiatan.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka mencari masukan bagi implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 diketuai Agus Hermanto (F-PD) diterima Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Yusri Effendi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Jajarannya.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ini terdiri dari Syamsul Bachri, Rully Chairul Azwar dan Ferdiansyah, masing-masing dari F-PG, Anton Sukartono Suratno, Muslim, dan Albert Yaputra dari F-PD, Dedi Suwandi Gumelar, Asdy Narang dan Irsal Yunus, ketiganya dari F-PDIPerjuangan, Rohmani (F-PKS), Nasrullah (F-PAN), Mohd. Faisal Amin (F-PPP), dan Budi Heryadi (F-Gerindra). (sc) foto: wy/parle.

Posko Peduli Banjir DPR Salurkan Bantuan Rp 308,9 juta dan Obat-obatan serta Makanan

Posko Peduli Banjir DPR-RI menyalurkan bantuan berupa uang sebesar Rp 308,9 juta, obat-obatan, makanan dan pakaian kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serang dan Karawang yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Januari 2013 yang lalu.

Laporan Panitia yang diterima Parlemen Selasa (12/2) menyebutkan bahwa kepedulian Pimpinan DPR, para anggota dan Sekretariat Jenderal DPR-RI atas musibah banjir tersebut sangat tinggi. Terbukti, begitu banjir melanda di berbagai daerah, DPR langsung membuka Posko Banjir dan mendapat sambutan antusias berbagai kalangan masyarakat.

Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie didampingi isteri dan rombongan meninjau langsung serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang masih terisolir dan belum tersentuh bantuan pemerintah. Selama enam hari penuh sejak Sabtu (19/1) hingga Kamis (24/1), Pimpinan Dewan dari Fraksi PD ini mengunjungi dan membagikan bantuan korban banjir di Jembatan Besi, Grogol, Jakarta Barat, peninjauan dua lokasi di Marunda dan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, peninjauan ke pesantren Darul Quro, Kresek, Tangerang dan desa Gembor, Binua, Serang dan peninjauan ke Babelan, Bekasi.

Peninjauan berikutnya ke Kapuk Raya, Kampung Apung Jakarta Barat dan ketiga lokasi di Karawang masing-masing Ponpes Nurussalam, desa Medang Asem, desa Teluk Bango dan desa Karya Mulya, Kecamatan Batujaya. Tidak hanya menyerahkan bantuan berupa nasi bungkus dan makanan siap saji, obat-obatan serta perlengkapan rumah tangga lainnya, Ketua DPR juga membawa Tim Medis dan obat-obatan yang sangat dirasakan manfaatnya bagi para korban banjir.



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyaksikan penyerahan bantuan di Posko Peduli Banjir DPR.

Laporan Panitia juga menyebutkan bahwa bantuan yang dihimpun melalui Posko Banjir DPR tidak hanya dari para anggota, pegawai Setjen DPR dan Korpri Setjen DPR, tetapi juga dari perorangan dan instansi pemerintah lainnya. Seperti dari Kementerian Sosial, PT PGN, Rotary Club, PT Pertamina, Kementerian Kesehatan dan PT Semen Baturaja. (mp)foto:wy/parle.



Masyarakat menerima bantuan di Posko Peduli Banjir DPR.

Panja Komisi IX DPR RI : Terima Klarifikasi Anggaran Vaksin Flu Burung Dari Kemenkes



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

Panitia Kerja (Panja) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia Komisi IX DPR RI, menerima klarifikasi dari Kementerian Kesehatan RI bahwa anggaran untuk pembangunan Fasilitas Vaksin Flu Burung.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panja Nova Riyanti Yusuf (F-PD) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama dan Dirut PT Bio Farma (Persero) Iskandar, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/2)

“Anggaran pembangunan fasilitas vaksin flu burung, semula Rp 143 Miliar pada 2008, kemudian ada penambahan Rp 299 Miliar pada 2009, Rp 276 Miliar pada 2010, dan Rp 476 Miliar pada 2011 (tidak terealisasi). Sehingga total anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp 902 Miliar,” kata Nova yang juga Wakil Ketua Komisi IX.

Dijelaskan Nova, Panja akan mengundang BAKN DPR RI, untuk melakukan klarifikasi data karena BAKN menyebutkan bahwa total anggaran pembangunan fasilitas vaksin flu burung adalah sebesar Rp 2,2 Triliun.

Selain itu, Panja juga akan meng-

undang Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rapat panja selanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Panja meminta Kemenkes untuk menyerahkan seluruh salinan surat beserta dokumen lainnya yang terkait dengan proyek pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi vaksin flu burung, selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2013.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dirut Bio Farma Iskandar menjelaskan, bahwa PT Bio Farma tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi vaksin flu burung kepada pemerintah melalui BAPPENAS maupun kepada pihak lain yang terafiliasi dengan pemerintah.

“Adapun permohonan pembiayaan melalui BAPPENAS yang diajukan Bio Farma adalah untuk diteruskan kepada pihak pemerintah Jepang sebagai hibah luar negeri,” jelas Iskandar.

Iskandar menjelaskan, bahwa kehadiran Bio Farma pada pembahasan anggaran pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung yang dipersiapkan oleh Kemenkes di Kementerian Keuangan, adalah atas permintaan Kemenkes dengan alasan untuk memberi penjelasan apabila ada pertanyaan teknis dari

Kementerian Keuangan.

Ditegaskan Iskandar, bahwa secara hukum Bio Farma belum menerima apapun dari proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung, Bio Farma hanya menyediakan lahan untuk pembangunan pabrik vaksin flu burung tersebut.

Sementara, Dirjen P2PL Kemenkes Tjandra Yoga Aditama, menyatakan bahwa dari sudut kesehatan masyarakat, keberadaan pabrik vaksin flu burung sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Dalam rapat tersebut, Tjandra memaparkan bahwa dokumen yang ada pada Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan saat ini adalah Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 871/Menkes/SK/IX/2008.

Dokumen mengenai kelanjutan kegiatan pembangunan pabrik vaksin flu burung secara lengkap, menurut Tjandra sudah dibuat Badan Litbangkes dan Ditjen PP dan PL dalam bentuk Kajian Ilmiah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Vaksin Flu Burung untuk Manusia, dan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia. (sc)foto:ry/parle.



Jajaran Eselon I Kementerian Kesehatan dan Dirut PT Bio Farma saat rapat dengan Komisi IX DPR.

Komisi IV Minta Pemerintah Susun Kebijakan Kendalikan Harga Daging Sapi

Kelangkaan daging saat ini membuat harga daging sapi melonjak. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah membuat kebijakan mengendalikan harga daging sapi, dan mendukung Pemerintah untuk terus melaksanakan Program swasembada daging sapi dan kerbau hingga 2014.

“Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam membuat kebijakan dan mengendalikan gejolak harga daging sapi,” kata Anggota Komisi IV Honing Sanny, setelah RDP dengan 3 Kementerian di Gedung DPR RI, Senin (11/2).

Selanjutnya terkait dengan adanya dugaan kartel dalam industri daging impor nasional, Honing mengharapkan Pemerintah menggelar investigasi terhadap dugaan adanya kartel tersebut. Saat ini tercatat 67 perusahaan memiliki izin sebagai importir daging. Dari 67 importir daging yang mendapat jatah kuota impor perlu ditelisik kemungkinan masuk dalam grup usaha.

“Pemerintah bisa menggelar investigasi atas dugaan kartel dalam industri daging nasional, dengan tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah,” tegas Honing Sanny.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, juga mempertanyakan belum adanya daging impor yang masuk ke Indonesia hingga akhir Januari 2013. Padahal, jatah kuota daging impor telah dibagikan lebih awal yakni pada akhir Desember 2012.

Lebih Lanjut, Honing menjelaskan bahwa Komisi IV sepakat dengan Pemerintah untuk tidak menambah



Anggota Komisi IV DPR Honing Sanny.

kuota impor tahun 2013, serta menurunkan berat maksimal sapi bakalan impor yang semula 350 kg/ekor menjadi 250 kg/ekor.

Tahun ini pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar 80.000 ton. Alokasi itu terdiri dari daging sapi bakalan sebesar 288.000 ekor dan impor daging beku sebesar 32.000 ton. Sementara tahun lalu, impor sapi bakalan sebesar 283.000 ekor. Sedangkan impor daging beku sebesar 34.000 ton.

Selain itu, Komisi IV meminta Pemerintah untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung program swasembada daging sapi dan memberikan sanksi tegas dan memproses secara hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

“Komisi IV sedang melakukan penyusunan naskah akademik dan draft RUU perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” tegas Honing. (as)foto:wy/parle.

Sempat Tertunda, Komisi XI Akhirnya Setujui IPO Semen Baturaja

Setelah Rapat internal yang digelar Komisi XI DPR selama kurang lebih dua jam, Senin 11 Februari, akhirnya DPR menyetujui *Initial Public Offering* (IPO) Semen Baturaja dengan sejumlah catatan penting.

Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Zaini Rahman, secara prinsip seluruh Fraksi di Komisi XI DPR menyetujui penjualan saham perdana Semen Baturaja dengan catatan. “Kita mensyaratkan saham dijual kepada PT Semen In-

donesia, jangan ke bursa saham,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Senin Sore, (12/2).

Dia mengatakan, saham yang dijual tersebut berjumlah 35 persen. karena itu, Lanjutnya, Kementerian



Anggota Komisi XI DPR Zaini Rahman.

BUMN dan Direksi Semen Baturaja harus segera memberikan penjelasan soal Roadmap PT Semen Baturaja kepada DPR RI. “Roadmap ini sudah kita minta beberapa kali tetapi tidak pernah ada penjelasan dari Pihak Direksi Semen Baturaja maupun Kementerian BUMN,”ujarnya.

Sebelumnya memang sempat adanya penundaan saat pengambilan keputusan terkait Semen Baturaja, bahkan sempat dibayangi

voting terkait keputusan IPO tersebut.

Hasil keputusan Komisi XI DPR akan ditindaklanjuti dengan surat tertulis kepada Pemerintah terkait persetujuan DPR RI terhadap IPO Semen Baturaja. “Nanti akan segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen tertulis,” ujar Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis. (si) foto: iwan armanias/parle.

Baleg DPR Hapus Usulan Pemilu Serentak

Badan Legislasi DPR RI sepakat menghapus usulan pelaksanaan pemilu serentak yang ada dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres).

Kesepakatan itu disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono (F-PD), saat menutup rapat pleno Baleg di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin(11/2)

“Usulan pelaksanaan pemilu serentak sudah tidak mungkin dilakukan mengingat akan menuai banyak perdebatan yang menghabiskan banyak waktu,” kata Mulyono.

Mulyono memutuskan poin pembahasan pemilu serentak dihapuskan, karena pemilu sudah dekat dan implementasi Undang-Undang pun harus dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan.

Dijelaskan Mulyono, walaupun usulan pemilu seren-



Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono.

tak ini nantinya di komo d a s i di UU Pilpres, implementasinya sudah tidak mungkin dilakukan pada Juli 2014 saat Pilpres dilakukan.

“Baleg memutuskan untuk lebih mengerucutkan pembahasan RUU Pilpres pada

lima poin krusial, yaitu besaran *presidential threshold*, tahapan Pilpres, administrasi capres, persyaratan menjadi capres, dan pendanaan capres,” papar politisi Partai Demokrat ini. (sc) foto: wy/parle.

Komisi X Nilai Kinerja Kemenparekraf Kurang Maksimal

Komisi X menilai kinerja penyerapan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di tahun 2012 kurang maksimal.

Hal itu mengemuka saat Komisi X DPR Raker dengan Menteri parekraf Mari Elka Pangestu itu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (11/2).

“Daya serap anggaran tidak efektif, sehingga hal itu bisa dijadikan indikasi bahwa penghitungan pengajuan belum tepat. Hal ini bisa diakibatkan dari Komisi X yang

percaya saja dengan pengajuan kementerian, bisa juga dari kementerian yang terlalu ambisius mengajukan anggaran, padahal tidak memiliki waktu yang panjang,” jelas anggota DPR dari Partai Golkar Zulfadhli.

Dia mengharapkan, kedepannya perhitungan dalam pengajuan anggaran harus lebih baik lagi, sehingga indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam renstra pada tahun anggaran tersebut dapat dicapai.

Di tahun anggaran 2012, pagu anggaran Kemen-



Anggota Komisi X DPR Zulfadli.

parekraf adalah Rp 2 Triliun, selama pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2012, Kemenparekraf mendapatkan tambahan dana dari APBN-P sebanyak Rp. 620 miliar. Sementara Total pagu Kemenparekraf adalah Rp 2.7 Triliun. Namun, penyerapan anggaran pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 2.2 Triliun artinya Kemenparekraf hanya menyerap dana sebanyak 81,67%.

Menyinggung soal Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Zul menyangsikan keefektifan program ini. Ia menilai dampak dari program ini belum sesuai dengan harapan Komisi X DPR.

“Sudah ada belum evaluasi program PNPM Mandiri ini? Bagaimana dampaknya ke masyarakat? Kita bukan melihat kuantitas penambahan desa wisata yang dibuat oleh masyarakat itu, tapi bagaimana dampak secara menyeluruh. Program ini jangan hanya ‘me-

nyenangkan’ masyarakat, tapi juga sesuai dengan tujuan awal program ini. Karena itu kita minta dilakukan evaluasi menyeluruh bagaimana pelaksanaan dari program ini,” tegas anggota F-PG ini.

Dalam rapat juga dibahas mengenai Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) 1 BPK-RI Tahun 2012. Dalam paparannya, Mari hanya menguraikan adanya 29 temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2012. Sedangkan Komisi X memiliki data Hapsem dari BPK sebanyak 48 temuan, dengan nilai belasan miliar. Karena itu, sejumlah anggota Komisi X DPR mempertanyakan selisih temuan tersebut, dan berharap Kemenparekraf dapat mengklarifikasi hasil temuan tersebut.

Sebagai agenda terakhir, juga dibahas mengenai persiapan pelaksanaan APBN 2013. Kemenparekraf melaporkan belum dapat melaksanakan DIPA 2013 dikarenakan adanya selisih perbedaan alokasi antara hasil persetujuan Komisi X pada raker 28 November 2012 dan DIPA 2013 pada 5 Desember 2012.

“Perbedaan terdapat pada alokasi anggaran jenis belanja pegawai. Terdapat selisih sebesar Rp 213 miliar, sehingga kami memohon kepada Komisi X untuk menyetujui alokasi anggaran sesuai dengan DIPA 2013 tertanggal 5 Desember 2012 tersebut,” ujar Mari. (sf) foto: wylparle.

Indonesia Dilirik Para Investor Qatar



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dubes Qatar Muhammad Khater Al Khater.

Hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia-Qatar terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Dahulu, Qatar banyak menanamkan investasinya ke negara-negara Barat. Kini, Indonesia sangat dilirik oleh para investor Qatar seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menerima Duta Besar Qatar yang baru untuk Indonesia Muhammad Khater Al Khater di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

“Dulu, memang, mereka orientasinya ke Barat. Tapi perkembangan terakhir dengan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif bagus, dari segi keamanan stabil, sangat menarik bagi para pemilik modal untuk masuk ke Indonesia,” ungkap Marzuki. Dan salah satu investasi Qatar yang ada di Indonesia adalah bidang telekomunikasi lewat Qtel yang menguasai Indosat. Indonesia sudah menjadi magnet yang dilirik para investor Qatar.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI, Dubes Qatar menyampaikan bahwa Indonesia kini menjadi negara yang sangat penting bagi Qatar. Untuk itu, pemerintah Qatar telah mengoperasikan 16 bank cabang di kota-kota besar di Indonesia. Volume Penerbangan Qatar-Indonesia juga terus meningkat. Bahkan, di Jakarta sudah berdiri Qatar Foundation untuk membantu rakyat Indonesia dari bencana alam.

Untuk menarik investasi kedua negara, kepada Ketua DPR, Dubes Qatar berharap agar dibuka seluas-luasnya jalur penerbangan dari Qatar ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta seperti

selama ini. Ia juga berharap kerjasama ekonomi dan politik kian membaik selama dia bertugas di Indonesia. Bahkan, ia siap mengantarkan para pejabat Indonesia untuk berkunjung ke Qatar.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR juga menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentu sangat strategis untuk dibangun kerjasama bilateral. Diplomasi harus terus ditingkatkan di antara kedua negara. Bahkan, Ketua DPR juga sempat menyampaikan soal dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Ia berharap, agar Palestina bisa menjadi kawasan yang aman dan stabil.

Pada bagian lain, Dubes Qatar juga menyampaikan bahwa dahulu sebelum ditemukannya sumber-sumber energi minyak, Qatar masih termasuk negara miskin. Penduduknya hanya bergantung pada sumber alam berupa ikan dan berlian. Bahkan, banyak penduduk Qatar yang eksodus ke negara-negara tetangga. Kini, setelah ditemukan sumber-sumber energi, ekonomi Qatar melejit dan malah banyak menanamkan investasi ke hampir semua negara di dunia. (mh), foto : hindra/parle/hr.

Komnas HAM Punya Waktu Sebulan Tuntaskan Masalah Internal

Komisi III DPR RI memberi waktu 1 bulan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah internal yang telah membelit 13 komisionernya. Apabila gagal maka Komisi III dalam posisi siap mengambil sikap termasuk melakukan pemilihan ulang.

“Kita mendesak Komnas HAM dalam waktu paling lama 1 bulan menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak selesai, Komisi III memandang masalah internal telah mengganggu kinerja sehingga dipandang perlu melakukan pemilihan kembali,” kata Almuzammil Yusuf saat memimpin RDP dengan Komnas HAM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/13).

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PKS ini juga menyampaikan keprihatinan atas informasi mogok kerja karyawan Komnas HAM yang diterimanya. Ia meminta para komisioner dan kesekjenan dapat memberi



Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsudin.

perhatian pada aspirasi yang ditan-datangani 100 karyawan, yang tembusannya juga diterima Komisi III.

Sebelumnya anggota Komisi III dari FPD Didi Irawadi Syamsudin menyebut waktu 1 bulan untuk menuntaskan konflik internal terlalu lama. Baginya waktu 2 minggu sudah cukup. “Masalah HAM adalah masalah krusial bangsa, kalau persoalan internal saja makan waktu lama bagaimana masalah bang-

sa bisa diselesaikan. Menurut saya waktu 1 bulan terlalu lama kenapa tidak 2 minggu,” tegasnya.

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyatakan dapat menerima permintaan Komisi III. Ia mengaku optimis dapat menyelesaikan persoalan pada awal Maret yang akan datang. “Kita sudah mengagendakan rapat paripurna pada awal Maret, saya rasa bisa selesai dalam pertemuan tersebut,” demikian Otto.

Masalah internal komisioner pejuang HAM ini mendapat perhatian publik setelah media memberitakan perdebatan mereka untuk memperpendek masa jabatan pimpinan menjadi 1 tahun. Dalam RDP terungkap sejumlah masalah lain diantaranya manajemen kesekjenan yang tidak optimal. Terbukti kosongnya 4 jabatan kepala biro dalam waktu cukup lama. (iky) foto:doc.

Komisi I Minta Lemhanas Tata Rekrutmen Kepemimpinan Nasional Berwawasan Kebangsaan



Anggota Komisi I DPR Cahyo Kumolo.

Anggota Komisi I DPR RI Cahyo Kumolo mengharapkan kepada, Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) untuk melakukan penataan dan pembenahan dalam melaksanakan rekrutmen kepemimpinan nasional.

“Hal ini penting, untuk menyamakan visi dan persepsi sebagai pemimpin bangsa secara komprehensif yang berwawasan kebangsaan,” kata Cahyo Kumolo (F-PDIP), saat RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhanas dan Sekjen Wantanas (Dewan Ketahanan Nasional) di Gedung DPR, Senin (11/2).

Lebih lanjut Cahyo Kumolo mengatakan, kajian kewilayahan yang dilakukan Wantanas penting, karena didasari karut-marut tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan tidak ada satu visi yang sama.

Ia mengusulkan, dalam rapat kabinet Wantanas diajak serta untuk evaluasi, sehingga pengambilan keputusan politik pembangunan tingkat nasional dasarnya telaahan wantanas dan dijabarkan secara makro oleh Lemhanas. “Watanas diikutkan dalam Rapat Kabinet sebagai bahan suatu pengambilan keputusan masalah strategis, karena aspek kajian kewilayahan sangat strategis,” ungkapnya.

Anggota Komisi I Lili Wahid (F-KB) merespon baik kepada Lemhanas untuk mengembalikan kepada kondisi masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Karena menurutnya dengan dicabutnya Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) maka hubungan antara negara dengan warga negara itu putus.

“Saya mendukung Lemhanas mengembalikan masyarakat kepada jati diri yang berwawasan kebangsaan,” tegas Lili Wahid.

Sedangkan Adjeng Ratna Suminar (F-PD) menginginkan penambahan jumlah peserta Lemhanas yang berasal dari partai politik. Dengan demikian, wakil rakyat di DPR dapat memperoleh tambahan ilmu dari Lemhanas untuk mengamankan dan mensejahterakan NKRI.

Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menjelaskan semakin meningkatnya suhu politik nasional terkait pelaksanaan Pemilu 2014, merupakan potensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Berdasarkan studi Lemhanas bahwa beberapa entitas memiliki pengaruh besar, seperti kader partai politik, pengusaha dan unsur media, yang dipandang perlu mendapat masukan mengenai wawasan kebangsaan agar berorientasi kepada kepentingan nasional.

Terhadap entitas masyarakat tersebut, akan dilakukan pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan cara pandang mereka demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan salah satu tugas dan fungsi Lemhannas.

“Atas dasar tersebut, timbul gagasan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan maupun pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan komponen pendukung pendidikan dan pelatihan termasuk sarana serta prasarana,” paparnya.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, ini berkesimpulan Komisi I memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi anggaran TA 2012 yang mencapai 93,09% bagi Lemhanas dan 96,25% bagi Wantanas, selanjutnya terus meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi serta memperhatikan rekomendasi dan catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Gubernur Lemhanas dan Sekjen Wantanas saat rapat dengan Komisi I DPR.

Selanjutnya, Komisi I memahami permintaan Lemhanas yang akan melakukan relokasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam upaya optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja honor dan belanja bahan yang akan dialokasikan untuk sasaran pemantapan wawasan kebangsaan dan mendukung peningkatan sarana dan prasarana.

Selain itu, Komisi I meminta Lemhanas dan Wantanas untuk meningkatkan *capacity building* melalui program

kerjasama dengan universitas, kementerian dan lembaga, partai politik, media massa, dan organisasi massa dalam menjalankan fungsi kajian strategi pemantapan wawasan kebangsaan dan pendidikan kepemimpinan secara berkelanjutan. (as)foto:wy,ry/parle.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Parlemen Pakistan Pertanyakan Relasi Militer Dengan Demokrasi Indonesia



Wakil Ketua BKSAP DPR Hayono Isman memimpin pertemuan dengan delegasi Parlemen Pakistan.



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Hayono Isman mengungkapkan, walaupun Pakistan telah menjadi negara demokrasi lebih awal dibanding Indonesia, namun mereka ingin belajar tentang Indonesia mengelola demokrasi. Khususnya peranan militer Indonesia, sehingga demokrasi Indonesia berjalan dengan baik dan lebih sukses dari pada demokrasi di Pakistan.

Hal itu diutarakan Hayono Isman se usai memimpin pertemuan BKSAP dengan Delegasi Parlemen Pakistan dipimpin Mushahid Hussain Sayed di lantai IV Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta Senin (11/2).

Menurut Hayono, kepada Delegasi Parlemen Pakistan yang didampingi Organisasi Pengembangan Hukum dan Transparansi Pakistan dijelaskan pula mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia, lanjut politisi Partai Demokrat ini, tidak bisa melupakan bagaimana dengan pernyataan mundur Presiden Soeharto dengan dukungan militer, telah memberi jalan bagi perkembangan demokrasi.

“Ini yang kita sampaikan. Sayang, sikap mundur Presiden Soeharto ini tidak diikuti seperti Libia dan Suriah

dimana Presidennya tidak menyatakan mundur, sehingga berakibat parah kepada kondisi negara-negara tersebut,” terangnya.

Oleh karena itu, kunjungan Delegasi Parlemen Pakistan ingin mengetahui persis bagaimana relasi militer sekarang ini dengan demokrasi dengan pemerintahan sipil. Hayono menjelaskan bahwa militer Indonesia sekarang ini sudah sepenuhnya mendedikasikan dirinya kepada TNI yang profesional, tidak lagi masuk ke wilayah politik.

Pada kesempatan ini disinggung pula bahwa banyak pensiunan militer yang masuk ke dalam politik. Ketika ditanya apakah ada militer yang masuk parlemen, ujar Hayono Isman, sekarang tidak ada lagi. “Tapi pensiunan militer boleh aktif ke dalam politik dan mereka menjadi pimpinan partai politik. Bahkan ada yang menjadi calon Presiden untuk pemilu 2014,” kata Hayono menambahkan.

Hadir pula dalam acara ini anggota BKSAP Najib Ibrahim, Atte Sugandhi, Muhammad Hatta, Idris Sugeng, Azam Azwan Natawijaya dan Chusnunia Chalim. (mp) foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hayono Isman tukar menukar Cenderamata dengan Ketua Delegasi PILDAT Syed Nayyer Hussain Bukhari di ruang rapat BKSAP Gedung Nusantara III DPR RI. Senin (11/02), foto iw/parle.



Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian membahas program swasembada daging dan sapi, dipimpin Ketua Komisi IV M. Romahurmuziy didampingi Firman Subagyo dan Ibnu Multazam. Senin (11/02), foto : wy/parle.



Suasana Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian RI membahas peningkatan sistem rekrutmen pendidikan dan jenjang karier di Kepolisian RI. Rabu (13/02), foto : wy/parle.